

SPLP

(Sistem Penghubung
Layanan Pemerintah)

Dipresentasikan pada:
Rakor-SPBE
Jakarta, 17 Oktober 2023



FAKULTAS
ILMU
KOMPUTER

Prof. Yudho Giri Sucahyo, Ph.D
yudho@cs.ui.ac.id
*Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Indonesia*



Prof. Yudho Giri Sucahyo, S.Kom, M.Kom, Ph.D, CDPSE, CEH, CISA, CISM, ISO 27001 LA

- Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer - UI
- Sekretaris Senat Akademik UI (2018-sekarang)
- Sekretaris PANDI (2023-2027)
- Penasihat Ahli Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- Staf Khusus Divisi TIK POLRI
- IT Advisor BUMN ID-FOOD
- Anggota *DIODE (Development Implications of Digital Economies) Strategic Research Network*
- *ISACA Academic Advocate*

Pendidikan

- Alumni PPRA-56 Lemhannas RI
- S3 School of Computing, Curtin University of Technology, Australia
- S1 dan S2, Fakultas Ilmu Komputer – UI

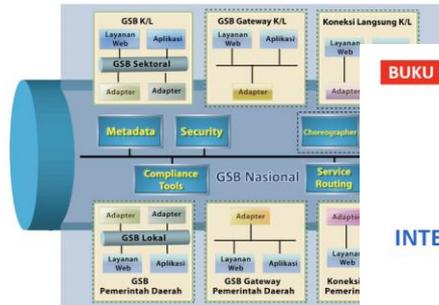
Sertifikasi

- *Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE)*
- *Certified Ethical Hacker (CEH)*
- *Certified Information Systems Auditor (CISA)*
- *Certified Information Security Manager (CISM)*
- ISO₂7001 (Information Security Management System) Lead Auditor
- E-mail: yudho@cs.ui.ac.id, yudhogs@gmail.com HP: 08118827472

Dulu.....

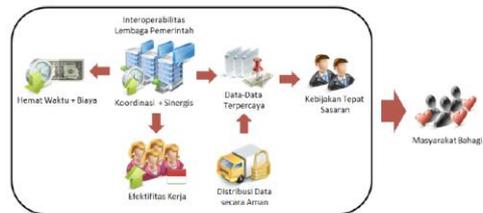
BUKU PEDOMAN

TATA KELOLA DAN TATA LAKSANA INTEROPERABILITAS SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAH



BUKU PEDOMAN

KERANGKA KERJA INTEROPERABILITAS E-GOVERNMENT INDONESIA



GOVERNMENT SERVICE BUS

DIREKTORAT E-GOVERNMENT
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA R.I.

E-GOVERNMENT INTEROPERABILITY FRAMEWORK

DIREKTORAT E-GOVERNMENT
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA R.I.

2013



Prof. Wayan
(19 April 2015)



Pancat Setyantono
(28 Mar 2021))



Didi Sukyadi
(20 Feb 2022)

Pada saat ini

traveloka Hotel Tiket Promo

Filter: Harga Transit Maskapai Waktu

Berangkat Tiba Durasi Harga per orang

	Lion	Rp 649.000	Rp 645.700	Pilih Pergi
13:00	14:05	1j 5m		
Jakarta (CGK)	Semarang (SRG)	langsung		
Detail Penerbangan	Rincian Harga			
	Lion	Rp 649.000	Rp 645.700	Pilih Pergi
14:50	15:55	1j 5m		
Jakarta (CGK)	Semarang (SRG)	langsung		
Detail Penerbangan	Rincian Harga			
	Sriwijaya	Rp 713.999	Rp 708.600	Pilih Pergi
07:10	08:15	1j 5m		
Jakarta (CGK)	Semarang (SRG)	langsung		
Detail Penerbangan	Rincian Harga			
	NAM	Rp 801.999	Rp 796.000	Pilih Pergi
13:30	14:35	1j 5m		
Jakarta (CGK)	Semarang (SRG)	langsung		
Detail Penerbangan	Rincian Harga			
	Batik	Rp 814.000	Rp 809.800	Pilih Pergi
05:40	06:45	1j 5m		
Jakarta (CGK)	Semarang (SRG)	langsung		
Detail Penerbangan	Rincian Harga			
	Citilink		Rp 868.660	Pilih Pergi
05:15	06:20	1j 5m		
Jakarta (HLP)	Semarang (SRG)	langsung		
Detail Penerbangan	Rincian Harga			

agoda Layanan Pelanggan +62 21 2188 9001

Pekalongan 19 Des 2016 23 Des 2016 1 Kamar, 2 Dewasa, 0 Anak Cari

Pencarian terakhir saya Sembunyikan

- The Lantern Resorts Patong 24 Des - 28 Des | 1 Kamar, 2 Dewasa
- The Lantern Resorts Patong 10 Des - 11 Des | 1 Kamar, 2 Dewasa
- Pattaya 19 Des - 23 Des | 1 Kamar, 2 Dewasa

Pekalongan: 9 properti. Menampilkan 1 - 9

Urutkan berdasarkan: Direkomendasikan Harga Penawaran Bintang Nilai ulasan tamu

	Hotel Sahid Mandarin Pekalongan ★★★★ Pekalongan Timur, Pekalongan GRATIS WiFi 1 orang saat ini sedang melihat hotel ini. Pembatalan Gratis! Bayar Nanti	Bagus 6,7 223 Ulasan IDR 650.000 Tarif per malam mulai IDR 275.207
	Regina Hotel Pemalang ★★★★ Pemalang, Pemalang GRATIS WiFi Sarapan 1 orang saat ini sedang melihat hotel ini. Pembatalan Gratis! Bayar di properti	Sangat bagus 7,0 93 Ulasan Tarif per malam mulai IDR 381.405 2 kamar terakhir kami
	Nimira Syariah Hotel Pekalongan ★★★★ Pekalongan Timur, Pekalongan GRATIS WiFi Sarapan 1 orang saat ini sedang melihat hotel ini.	Sangat Bagus 7,9 162 Ulasan IDR 900.000 Tarif per malam mulai IDR 363.636

Nikmati diskon hingga 30% dengan Penawaran Khusus Anggota Agoda! Login sekarang

Area: Pekalongan Barat (2) Pekalongan Timur (3)

Tipe Akomodasi: Hotel (5)

Tingkatan Modernisasi Organisasi Pemerintah

Organization	Modernization level	ICT Role
1. Bureaucratic	Begin	Automatized Workflows (<i>e-Administration</i>)
2. Professional	Middle	Citizenship Interaction (<i>e-Government</i>).
3. Relational	Advanced	Key for transparency, accountability and collaboration (<i>Open Government</i>).
4. Intelligent	Optimal: Adopted completely Interoperability principle and Open Innovation as tool	Interconnected Ecosystem (<i>Smart Government</i>)

Table 1.- Modernization phases in Public Organizations, and ICT Role. Source: Jimenez et al. (2014)

Apakah sudah dimulai?

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

PERSYARATAN, RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES
SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA
KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79 ayat (4) dan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengatur secara nasional mengenai Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

SE

PSTE - SPBE

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 23

Penyelenggara Sistem Elektronik harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya, dengan tetap memperhatikan interoperabilitas dan kompatibilitas dengan Sistem Elektronik sebelumnya dan/atau Sistem Elektronik yang terkait.

Yang dimaksud dengan “interkonektivitas” adalah kemampuan untuk terhubung satu sama lain sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Termasuk dalam pengertian interkonektivitas adalah mencakup kemampuan interoperabilitas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 2

(1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

(7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

SPBE

Bagian Ketujuh Data dan Informasi

Pasal 26

- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Instansi Pusat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat masing-masing.
- (6) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.
- (7) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

SPBE

Paragraf 7

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 33

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan

d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

- (4) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (9) sebelum Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditetapkan dan tersedia, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah; dan
 - b. memenuhi ketentuan penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Satu Data

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

SATU DATA INDONESIA

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
8. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Permenkominfo 1/2023

ARSITEKTUR PENYELENGGARAAN LAYANAN INTEROPERABILITAS DATA NASIONAL

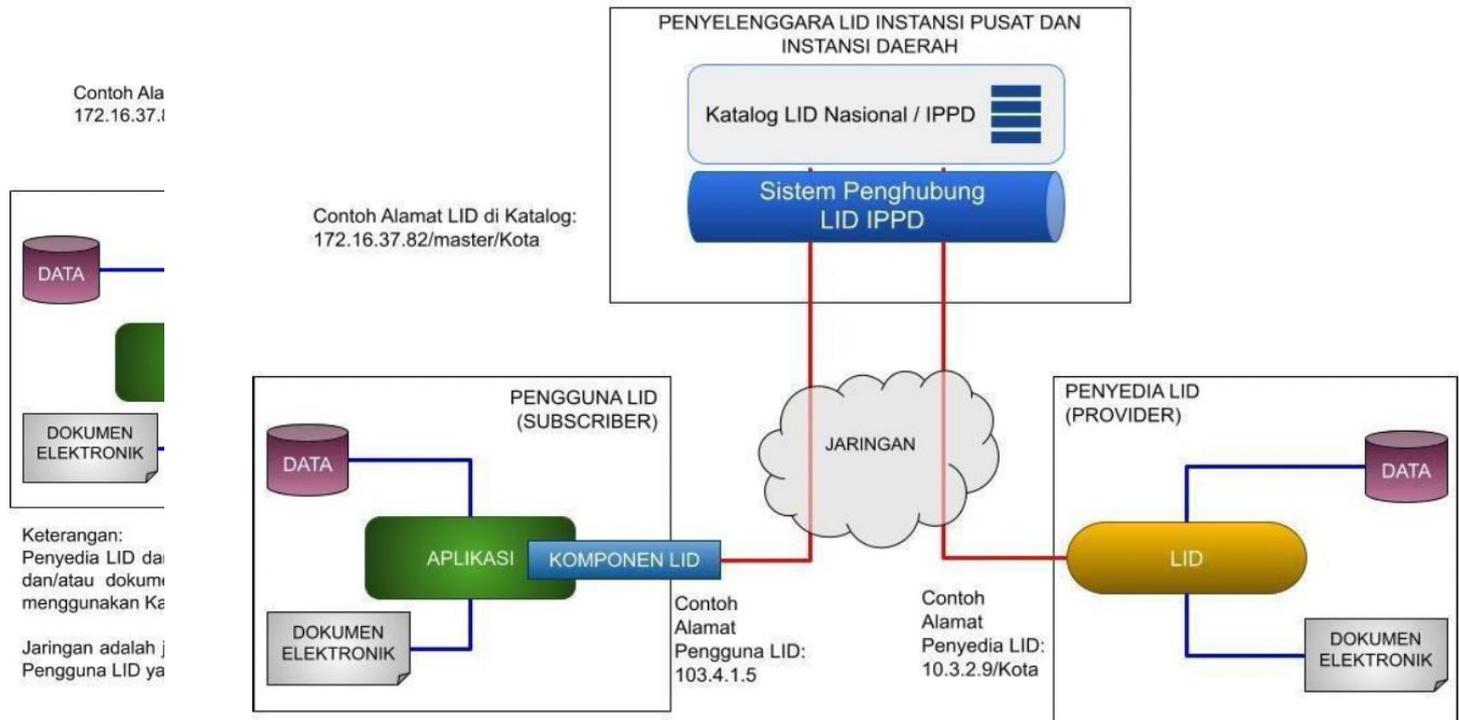
ARSITEKTUR PENYELENGGARAAN LAYANAN INTEROPERABILITAS INSTANSI PUSAT DAN INSTANSI DAERAH

MENTE

PERATURAN M

INTEROPERAE
SISTEM PE

1



splp.layanan.go.id



[Portal Penyedia](#) [Summary Report](#) [Konsolidasi Data](#)

[Dokumentasi](#)

[Masuk](#)

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Merupakan sistem untuk mendukung interoperabilitas data antar layanan Pemerintah bersekala Nasional

[Pengguna Layanan](#)

[Penyedia Layanan](#)



917

API Published



153

API Created



15

API Deprecated



1689

Total User



454

Total Tenant



97

Active Visitor



Katalog API

SPLP Portal Penyedia Summary Report Konsolidasi Data Dokumentasi **Masuk**

Kategori API
Nama IPPD

API SEMUA IPPD

- ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
- BADAN INTELIJEN NEGARA
- BADAN KEAMANAN LAUT RI
- BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
- BADAN KEPENDUDUKAN DAN KB NASIONAL
- BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
- BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
- BADAN NARKOTIKA NASIONAL
- BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
- BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
- BADAN NASIONAL PENEMPATAN PERLINDUNGAN TKI
- BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
- BADAN PANGAN NASIONAL
- BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
- BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
- BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
- BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
- BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
- BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
- BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
- BADAN PUSAT STATISTIK
- BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
- BADAN SAR NASIONAL
- BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
- BADAN STANDARISASI NASIONAL

Tag

API

Daftar API dari layanan yang terdaftar pada SPLP

API Penelusuran

 10 BERITA WEBLA... Dibuat oleh diskominfo_j... Versi 1.0 PUBLISHED LIHAT DETAIL	 AGENDA JATENG Dibuat oleh diskominfo_j... Versi 1.0 PUBLISHED LIHAT DETAIL	 AGENDA HUMAS KA... Dibuat oleh diskominfo_s... Versi 1.0 PUBLISHED LIHAT DETAIL	 AGENDAKABUPATEN Dibuat oleh diskominfo_b... Versi v1.0 PUBLISHED LIHAT DETAIL
 AGENDAOPD Dibuat oleh diskominfo_b... Versi 1.0 PUBLISHED LIHAT DETAIL	 ALAPSELUMAKAB Dibuat oleh diskominfo_s... Versi 1.0 PUBLISHED LIHAT DETAIL	 ALAT BERAT PUPR... Dibuat oleh diskominfo_s... Versi 1.0 PUBLISHED LIHAT DETAIL	 ANGGOTA MPRRI Dibuat oleh mpr_splp Versi 1.0 PUBLISHED LIHAT DETAIL
 ANGGOTADPRDKABT... Dibuat oleh diskominfo_L... Versi 1.0 PUBLISHED LIHAT DETAIL	 API Dibuat oleh brin_splp Versi 1.0 PUBLISHED LIHAT DETAIL	 API SSO Dibuat oleh admin Versi 1.0 PUBLISHED LIHAT DETAIL	 APIBATAM Dibuat oleh diskominfo_batam Versi 1.0 PUBLISHED LIHAT DETAIL
 APIOPENDATABNN Dibuat oleh brin_splp Versi 1.0.0 PUBLISHED LIHAT DETAIL	 APISOLOKKOTA Dibuat oleh diskominfo_s... Versi 1.0 PUBLISHED LIHAT DETAIL	 ASET SAMPANG Dibuat oleh diskominfo_s... Versi 1.0 PUBLISHED LIHAT DETAIL	 BAHANPOKOK Dibuat oleh diskominfo_b... Versi 1.0 PUBLISHED LIHAT DETAIL

SuperApp

jaki

Berbagai layanan dalam satu genggaman

20:32

Ditgahayu 496 Kota Jakarta

Rayakan dengan fitur-fitur unggulan JAKI >

Cari Layanan di JAKI

- Laporan Warga
- Berita
- Pajak
- Harga Pangan
- Transportasi Publik
- Peta
- Ambulans
- Semua

Lencana

JakOne Pay Rp500.000 Lihat detail

Bayar

Capek sama fenomena tukang parkir liar? Cek solusinya di sini

PRESISI

LAYANAN PRESISI POLRI

melalui genggaman anda!

Akses layanan polri, **TANPA HARUS ANTRI**

Beragam layanan polisi tersedia **online**

- SIM
- STNK
- TILANG
- SKCK
- DUMAS
- ESURVEY
- LAPORAN
- SP2HP
- INFO RAWAN
- PANGGILAN DARURAT
- DAN LAINNYA!

Unduh Sekarang!

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download **Pusaka Apps**

Satu Aplikasi untuk Layanan Kementerian Agama

Google play

Available on the App Store

Layanan Publik

- Pendaftaran Haji
- Sertifikasi Islam
- Pendaftaran Nikah
- Layanan Sudi
- Layanan Pengantun
- Kalender
- Berita
- Login

Sapawarga: Informasi, Aspirasi, Layanan Publik dalam Satu Aplikasi

kominfo

JAKARTA DIGITAL SERVICE

Terima Kasih